

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM MENGATASI PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

Erlina Dwi Lestari

NPP. 31.0304

Asdaf Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

Program Studi Studi Kebijakan Publik

erlinadwilestari938@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Meliasta Hapri Tarigan, AP, M.Si

ABSTRACT

Problem (GAP): This study explains the "City Without Slums" program implemented in Bandar Lampung City. **Objective:** The research aims to understand the implementation of the "City Without Slums" (Kotaku) program in tackling slum areas in Bandar Lampung City, identify the inhibiting factors in the implementation of the "City Without Slums" (Kotaku) program in tackling slum areas in Bandar Lampung City, and determine the efforts that can be made to overcome the inhibiting factors in the implementation of the "City Without Slums" (Kotaku) program to tackle slum areas in Bandar Lampung City. **Method:** This research employs a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques involve data collection, data reduction, data presentation, and data verification. **Results/Findings:** The results of the study indicate that the problems related to the implementation of the "City Without Slums" (Kotaku) program in tackling slum areas in Bandar Lampung City include ongoing miscommunication among employees in conveying information, the lack of facilities and infrastructure used to carry out responsibilities related to the implementation of the "City Without Slums" program in Bandar Lampung City, and the community's limited knowledge about the "City Without Slums" program implemented in Bandar Lampung City. **Conclusion:** Facilities and infrastructure that are not yet available at Bappeda (Regional Development Planning Agency) of Bandar Lampung City to facilitate the execution of responsibilities and providing training and development for employees related to their duties in the implementation of the "City Without Slums" program in Bandar Lampung City.

Keywords: Implementation, Program, City without Slums

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penelitian ini menjelaskan tentang program kota tanpa kumuh yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Kota tanpa kumuh (Kotaku) dalam menanggulangi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung, faktor penghambat dalam implementasi program Kota tanpa kumuh (Kotaku) dalam menanggulangi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung, dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi program Kota tanpa kumuh (Kotaku) untuk menanggulangi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. **Hasil/Temuan:** Masalah yang berkaitan dengan implementasi program Kota tanpa kumuh (Kotaku) dalam menanggulangi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung yaitu masih adanya miskomunikasi antar setiap pegawai dalam menyampaikan informasi, minimnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab berkaitan dengan pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kota Bandar Lampung, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang program kota tanpa kumuh yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung. **Kesimpulan:** Melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada di Bappeda Kota Bandar Lampung untuk memberikan kemudahan pelaksanaan tanggung jawab dan memberikan pembinaan dan pelatihan pegawai terkait kewajiban yang menyangkut implementasi program kota tanpa kumuh di Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Kota Tanpa Kumuh

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di negara Indonesia terjadi dengan sangat pesat sehingga menimbulkan dampak dari berbagai aspek kehidupan. Aspek yang sangat dapat dirasakan yaitu sulitnya untuk mencukupi beberapa kebutuhan rumah atau tempat tinggal bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan terbatasnya keterampilan untuk menciptakan permukiman wilayah bagi masyarakat. Masalah permukiman kumuh adalah masalah yang serius sebab dinilai bisa mengakibatkan adanya peningkatan selanjutnya mengakibatkan terciptanya berbagai macam masalah sosial yang terjadi. Semakin meningkatnya penduduk dan disertai dengan urbanisasi maka akan menciptakan masalah pembangunan dalam ketersediaan sarana permukiman sehingga mendesak Pemerintah untuk dapat membuat program agar bisa digunakan dalam menanggulangi masalah tersebut (Rahardjo,2010).

Pemerintah daerah melakukan kepemimpinan serta melakukan kerjasama dengan setiap pemangku kepentingan untuk merencanakan implementasi dan meningkatkan kontribusi masyarakat. Sejalan dengan harapan dari program tersebut upaya penanggulangan permukiman ini tidak hanya menanggulangi kekurangan yang ada tetapi juga untuk melakukan pencegahan hadirnya wilayah kumuh yang baru. Program ini berkaitan dengan undang undang nomor satu yang ditetapkan pada tahun 2011 membahas tentang Perumahan serta wilayah kumuh yakni upaya untuk menjaga serta

meningkatkan kualitas wilayah kumuh. Kondisi ini menjadi target program sehingga dapat mencapai situasi yang diharapkan (Winarno,2007).

Pencapaian tujuan ini dinilai dengan memberikan rumusan indikator supaya dapat Terlaksana dengan baik. Pada program kotaku dinilai menggunakan tujuh indikator sehingga dapat mengetahui apakah program ini berhasil atau tidak. Kondisi ini bisa dilihat dari banyaknya sampah yang dibuang di wilayah sungai. Dengan adanya program ini maka memberikan dampak baik bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa membantu penanganan wilayah mu serta masyarakat juga mengetahui bahaya apabila tinggal di lingkungan kumuh.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permukiman kumuh berkembang sebab urbanisasi yang tidak merata. perkembangan permukiman kumuh ini seringkali tidak Terlaksana dengan baik karena di setiap provinsi pasti mempunyai masalah yang harus ditanggulangi. Peningkatan jumlah masyarakat dan ketersediaan lahan untuk perumahan menjadi hal yang menyebabkan banyaknya permukiman kumuh. Permukiman kumuh meningkat karena di daerah provinsi permintaan tempat tinggal selalu mengalami peningkatan. Kondisi ini berbanding lurus dengan adanya lahan yang semakin minim serta harga yang tinggi. Permukiman kumuh seringkali ada di wilayah banjir, di lingkungan yang tidak sehat, di areal rel kereta api atau jalan-jalan yang sedang memiliki polusi tinggi. Salah satu masalah yang paling besar di daerah provinsi yaitu kualitas hidup yang identik dengan kemiskinan serta pemukiman (Subarsono,2005). Masalah-masalah tersebut menegaskan jika kedudukan permukiman kumuh sangat berkaitan dengan masalah kualitas hidup. Situasi lingkungan ini menjadi buruk minimnya keterampilan ekonomi dan sulitnya akses menuju sarana serta prasarana umum menyebabkan banyak masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh. Program kota tanpa kumuh adalah program pemerintah yang tujuannya untuk membentuk sistem yang terpadu supaya dapat menanggulangi permukiman kumuh.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilaksanakan oleh Abdurrahman, Eddy Suryani (2022) berjudul Implementasi Program Kotaku (Kota tanpa kumuh) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas Program Kotaku (Kota tanpa kumuh) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada teori penelitian yang digunakan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rizky Rahmani, Jauhar Arifin, Safrul Rijali (2020) berjudul Implementasi Program Kotaku (Kota tanpa kumuh) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, memiliki persamaan pada objek penelitian. Perbedaan penelitian ini terletak pada teori, lokasi, dan metode yang digunakan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Iska Aprilya Wulandari, H. Syahrani, Enos Paselle (2019), tentang Implementasi Program Kotaku (Kota tanpa kumuh) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Persamaan terletak pada objek penelitian dan perbedaan terletak pada teori yang digunakan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Fitri & Sakawati (2021) menunjukkan masih kurang baik yaitu pelaksana, dan sumber daya. Adapun faktor pendukung implementasi program adalah partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan lahan, pelaksana yang kurang aktif, serta masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Fasilitator diharapkan dapat memberikan fasilitas yang merata kepada seluruh masyarakat agar tidak terjadi kecemburuan sosial, pelaksana program harus lebih aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar semua masyarakat dapat mengetahui program KOTAKU dan menjaga infrastruktur yang telah diberikan. Penelitian selanjutnya yang dilakukan Ramandei, L., & Nawipa, S. (2023) menunjukkan Pencapaian belum tinggi dikarenakan belum semua kegiatan peningkatan belum dilaksanakan dan sampai penelitian ini dilakukan, masih ada kegiatan yang sedang berjalan. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Hamadi masih sangat rendah. Hal ini dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Program KOTAKU di Kelurahan Hamadi. Penelitian yang dilaksanakan oleh Zulyanti, D. (2017) menunjukkan implementasi program KOTAKU telah melalui 4 tahap utama yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Dari tiap-tiap tahap pelaksanaan program KOTAKU tidak seluruh masyarakat ikut terlibat di dalamnya, masih terlalu dominan peran pemerintah dalam segala bentuk pelaksanaan yang membuat tidak maksimalnya realisasi pembangunan berbasis masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Belasari, B., Rahman, B., & Ranto, R. (2022) menunjukkan evaluasi di kedua Daerah tersebut cukup berhasil. Dilihat dari proses pelaksanaan program ini, tepatnya di kedua Daerah mengalami perubahan yang awalnya kumuh menjadi berkurang kekumuhannya. Selanjutnya untuk pencapaian sendiri kedua Daerah tersebut sudah dibangun pembangunan infrastruktur agar masyarakat sekitar terbantu dengan adanya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini, walaupun belum sepenuhnya terwujud dari beberapa aspek tersebut. Dengan hal ini untuk evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di kedua Daerah tersebut cukup berhasil. Penelitian yang dilaksanakan oleh Idelia, A. D., Yusuf, Y., &

Kurniawan, I. A. (2021). menunjukkan implementasi program KOTAKU di Kelurahan Cibodas pada dimensi komunikasi (communication) sudah terkomunikasikan dengan baik melalui musyawarah perencanaan pembangunan, rapat pertemuan antar implementor dan sosialisasi. Dalam dimensi sumber daya (resources) kemampuan implementor yang baik dengan peningkatan melalui pelatihan-pelatihan, juga fasilitas pendukung sarana prasarana untuk memudahkan jalannya program dan anggaran melalui Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat (BPM) dan swadaya. Pada dimensi sikap pelaksana atau disposisi (disposition) terdapat komitmen yang berpengaruh optimal melalui Surat Perjanjian Kerja (SPK) menghasilkan transparansi dengan adanya kegiatan Launching Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat (BPM) dan pertanggungjawaban dengan pembuatan Lembar pertanggungjawaban (LPJ) dan audit kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta pada dimensi struktur birokrasi (bureaucracy structure) terdapat Standart Operating Procedure (SOP) waktu tiga bulan kerja dan pembagian tugas antar pelaksana program.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi program Kota tanpa kumuh (Kotaku) dalam menanggulangi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi program Kota tanpa kumuh (Kotaku) dalam menanggulangi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung, faktor penghambat dalam implementasi program Kota tanpa kumuh (Kotaku) dalam menanggulangi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi program Kota tanpa kumuh (Kotaku) untuk menanggulangi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Edward III. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas implementasi program Kota tanpa kumuh (Kotaku) dalam menanggulangi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung, faktor penghambat dalam implementasi program Kota tanpa kumuh (Kotaku) dalam menanggulangi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi program Kota tanpa kumuh (Kotaku) untuk menanggulangi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung.

3.1. Implementasi program Kota tanpa kumuh (Kotaku) dalam menanggulangi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung

Implementasi program Kota tanpa kumuh (Kotaku) dalam menanggulangi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung menggunakan wawancara bisa dipaparkan dibawah ini :

1. Komunikasi

a. Transmisi

Transmisi merupakan Indikator yang berkaitan dengan penyaluran komunikasi pada Bappeda dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat (Novira & Suherman, 2023). Pada dokumen yang sudah disebutkan indikator transmisi yang diinginkan bisa dilaksanakan oleh pegawai aparatur di Bappeda yaitu sikap solusi yang mempunyai sebuah karakteristik dengan melaksanakan komunikasi persuasif dengan memanfaatkan alternatif menyelesaikan sebuah masalah apabila sebuah hal tidak sejalan dengan keinginan masyarakat. Bappeda Kota Bandar Lampung melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan program Kota Tanpa Kumuh.

b. Kejelasan

Ketika mengimplementasikan program Kota tanpa kumuh yang memberikan kemudahan masyarakat untuk bisa menyalurkan komunikasi dengan maksimal, dibutuhkan kejelasan ketika menyampaikan komunikasi. Kejelasan sering kali dituliskan pada dokumen yang berkaitan dengan visi, misi, serta tata nilai Bappeda Kota Bandar Lampung yakni tata nilai Bappeda merupakan sikap tegas yang menjadi sebuah sikap pada budaya kerja Bappeda. Tegas mempunyai berbagai karakteristik yakni melaksanakan tanggung jawab dalam bersikap jujur untuk menyampaikan sebuah kebenaran.

c. Konsistensi

Indikator berikutnya yang memberikan pengaruh dimensi komunikasi yaitu konsistensi. Konsistensi merupakan tetap dan tidak mengalami perubahan taat asas berkesinambungan dan sejalan. Program Kota Tanpa Kumuh dilaksanakan secara berkesinambungan. Program Kota Tanpa Kumuh dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan. Program Kota Tanpa Kumuh dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan hasil observasi yang dilaksanakan dapat diketahui bahwa Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Provinsi Lampung dirancang untuk pengentasan kawasan kumuh hingga nol persen pada akhir tahun 2024. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti pembangunan infrastruktur dasar, termasuk tempat pengelolaan sampah terpadu, jalan beton, talud, dan utilitas lainnya.

2. Disposisi

Disposisi adalah perintah yang diberikan secara tertulis yang menjadi tindak lanjut aktivitas atau non kegiatan pada surat asli. Disposisi memberikan pengaruh proses penerapan, indikator pada disposisi yang bisa menentukan implementasi program Kotaku (Kota tanpa kumuh) yaitu indikator pengangkatan birokrat serta insentif.

a. Pengangkatan Birokrat

Pengangkatan birokrat adalah tahapan yang dibutuhkan pada suatu organisasi sebab tahapan ini akan menjadi penentu cara output dari kinerja sumber daya manusia yang terdapat pada suatu organisasi. Pengangkatan birokrasi pada program Kota tanpa kumuh yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bandar Lampung sendiri bisa dalam bentuk aparatur sipil negara (ASN), tenaga kontrak atau pihak yang menyediakan jasa perorangan (PJLP) untuk aparatur sipil negara menggunakan seleksi CPNS beserta PKP menggunakan tes yang dilakukan sesuai dengan masing-masing bidang. Pada penerapan budaya organisasi di Bappeda Kota Bandar Lampung berkaitan dengan kondisi mengangkat birokrasi dilaksanakan dengan ikut serta terhadap peraturan pemerintah Kota Bandar Lampung dan rekrutmen PJLP.

b. Insentif

Indikator yang memberikan pengaruh dimensi disposisi pada tahapan implementasi yaitu insentif. Untuk memberikan pengaruh setiap pegawai maka perlu dilaksanakan strategi berkaitan dengan insentif pegawai. Strategi yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan manipulasi insentif supaya bisa mendorong kinerja setiap pegawai pada sebuah organisasi. Kondisi ini bisa dilaksanakan dengan meningkatkan anggaran tertentu atau dengan memberikan keuntungan lain kepada setiap pegawai (Thoyibatun, 2012). Penambahan insentif diberi berdasarkan hasil kerja dan inovasi pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dan apabila tingkat kepuasan masyarakat menurun, maka pegawai juga tidak akan mendapatkan insentif. Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penambahan insentif atau penghasilan tambahan memberikan dampak baik yaitu memberikan motivasi kerja dan meningkatkan semangat kerja pegawai yang berpengaruh pada kualitas kinerja pegawai.

3. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan sebuah unsur yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pimpinan di sebuah organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta. Hal ini disebabkan sumber daya manusia adalah kunci utama dalam pengelolaan sebuah manajemen dalam sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik.

a. Staff

Setiap calon pegawai di Bappeda Kota Bandar Lampung akan direkrut dengan meninjau latar belakang pendidikan setiap calon pegawai, serta juga melaksanakan aktivitas diklat kepada para pegawai, selanjutnya setiap pegawai yang memiliki prestasi akan diberikan *reward* dan setiap pegawai yang melaksanakan pelanggaran, akan diberikan hukuman.

b. Informasi

Setiap informasi yang disebarluaskan penting untuk ditelaah. Setiap informasi yang dilaksanakan juga harus diketahui karena memberikan pengaruh yang sangat penting bagi

keberhasilan dan kelancaran program kota tanpa kumuh. Bappeda sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan menjalankan program kota tanpa kumuh. Bappeda Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan setiap pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk mengetahui kondisi lingkungan. Oleh karena itu indikator yang berhubungan dengan informasi pada dimensi sumber daya sudah dapat dipenuhi dengan didukung dokumen yang memaparkan tentang budaya yang harus dilaksanakan oleh seluruh aparat yang ada di Bappeda Kota Bandar Lampung.

c. Wewenang

Wewenang yang formal dalam penerapan pelayanan. Tidak hanya dalam memberikan pelayanan tetapi pada pelaksanaan program Kota tanpa kumuh juga harus dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang sudah ditentukan. Setiap pihak di Bappeda Kota Bandar Lampung mempunyai wewenang untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan. Sesuai dengan hasil observasi yang dilaksanakan dapat diketahui jika Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Bandar Lampung memiliki beberapa wewenang yang berkaitan dengan program Kota Tanpa Kumuh.

d. Fasilitas

Fasilitas merupakan indikator yang memberikan pengaruh terhadap sumber daya. Fasilitas fisik dalam suatu organisasi sangat memberikan dukungan terhadap keberhasilan suatu organisasi. Jika suatu organisasi sudah mempunyai sumber daya manusia yang kompeten dan sudah mempunyai wewenang untuk dapat melaksanakan hal-hal yang ingin dilaksanakan tetapi tidak mempunyai fasilitas dalam pelaksanaannya bisa mengakibatkan kegagalan pada penerapan suatu tanggung jawab pada sebuah organisasi sehingga fasilitas dalam bentuk sarana maupun prasarana pada suatu organisasi penting untuk dipenuhi sebagai faktor pendukung aparatur dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan maksimal.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah tatanan pada organisasi yang akan melaksanakan tanggung jawab dan fungsi suatu organisasi di mana pada dimensi struktur birokrasi ini dapat ditinjau menggunakan dua indikator yakni standar operasional prosedur dan fragmentasi.

a. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur adalah aturan yang mencakup tentang suatu aktivitas sehingga suatu aktivitas bisa terlaksana dengan maksimal. Pada regulasi dipaparkan tentang tanggung jawab pokok serta tanggung jawab dari setiap jabatan serta kewenangannya. Oleh karena itu karakteristik fragmentasi sudah dapat dipenuhi pada implementasi program Kota tanpa kumuh. seluruh pekerjaan menggunakan standar prosedur yang sudah ditentukan serta mekanisme yang jelas sehingga setiap pegawai mengetahui tanggung jawab pokok dan kegunaan seluruh bagian dan bidang pekerjaan. Sejalan dengan hasil wawancara Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat Dan Penyuluhan Sosial yang menjelaskan

jika: Dengan adanya prosedur yang jelas pada seluruh bidang pegawai dalam melaksanakan program Kota tanpa kumuh agar hasil yang diperoleh dapat terlaksana dengan maksimal.

b. Fragmentasi

Fragmentasi adalah penyebaran penghijab sebuah kebijakan kepada beberapa lembaga yang berbeda sehingga membutuhkan koordinasi. Program tanpa kumuh sangat berkaitan dengan kehidupan manusia (Zulyanto,2022). Pada kondisi yang fragmentasi birokrasinya tinggi maka seringkali cenderung adanya kesalahan persepsi namun juga menciptakan konflik sehingga hal ini harus diwaspadai. Sesuai dengan hasil wawancara dapat disimpulkan jika fragmentasi atau persebaran wewenang adalah alat memerlukan koordinasi yang cukup supaya sebuah kebijakan bisa dilaksanakan dengan maksimal menggunakan komunikasi yang sangat baik.

Faktor penghambat dalam implementasi program Kota tanpa kumuh (Kotaku) dalam menanggulangi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung

Pada dimensi komunikasi yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi program kota tanpa kumuh yaitu minimnya koordinasi antara masyarakat dengan aparatur pelayanan publik. Apabila komunikasi antara pelayanan dengan masyarakat minim maka kondisi ini dapat mengakibatkan kepuasan menjadi rendah. Berdasarkan dimensi disposisi yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan program Kota tanpa kumuh Kota Bandar Lampung yaitu indikator insentif yang mana peningkatan insentif masih belum dilaksanakan secara maksimal kepada setiap pegawai, kondisi ini dibuktikan dengan banyak pegawai yang tidak memperoleh penambahan gaji untuk mendorong kinerja aparatur dalam menjalankan tanggung jawab dengan sangat baik. Sehingga kondisi ini harus ditindaklanjuti oleh Bappeda untuk bisa memberikan reward kepada pegawai sehingga bisa mendorong kinerja aparatur. Sumber daya adalah hal yang dibutuhkan dalam penerapan pelayanan dan penerapan program salah satunya adalah program Kota tanpa kumuh. Karena keberhasilan program akan dilihat sesuai dengan kualitas sumber daya jika sumber daya pegawai pelayanan mempunyai kualitas yang maksimal maka aktivitas pelayanan juga akan terlaksana dengan sangat baik dan begitu pula sebaliknya. Standar operasional prosedur hanya formalitas untuk setiap pegawai baru serta hanya untuk yang mau patuh terhadap aturan. Kondisi yang menjadi faktor penghambat pada penerapan program Kota tanpa kumuh di Kota Bandar Lampung, mencakup :

1. Masyarakat menilai pelayanan pada Bappeda khususnya program Kota tanpa kumuh belum terlaksana dengan maksimal.
2. Masyarakat banyak yang belum memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan program Kota tanpa kumuh.
3. Pada pelaksanaan program kota tanpa kumuh, seringkali setiap pegawai tidak melaksanakan standar operasional prosedur secara berkesinambungan sehingga menjadi penghambat keberhasilan program Kota tanpa kumuh.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi program Kota tanpa kumuh (Kotaku) untuk menanggulangi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung

Program Kota tanpa kumuh merupakan program yang dilaksanakan untuk mengurangi lingkungan kumuh di suatu wilayah. Program Kota tanpa kumuh untuk memberikan peningkatan akses terhadap infrastruktur serta pelayanan dasar di wilayah kumuh untuk memberikan dukungan terciptanya permukiman yang layak huni, produktif serta berkesinambungan. Pemerintah Kota Bandar Lampung menggunakan Bappeda Kota Bandar Lampung sebagai instansi yang bertanggung jawab untuk memberikan kepastian seluruh masyarakatnya memperoleh pelayanan konsultasi dan bantuan apabila akan melaksanakan program Kota tanpa kumuh.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kondisi permukiman melalui berbagai strategi. Program ini mencakup penataan ruang kota, pemberdayaan masyarakat, pengadaan tanah, pembangunan rumah, serta kolaborasi dengan pihak swasta dan non-pemerintah. Dampak positif yang terlihat termasuk peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar seperti sanitasi dan kesehatan, serta pengurangan risiko bencana. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, resistensi masyarakat, dan koordinasi antarpihak terkait, tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini dalam jangka panjang. Evaluasi dan pengembangan terus-menerus diperlukan untuk memperbaiki implementasi dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung. Temuan dari Fitri & Sakawati (2021) menyoroti kurangnya pelaksanaan yang baik serta hambatan seperti keterbatasan lahan dan kurangnya keterlibatan aktif masyarakat. Ramandei & Nawipa (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap Program KOTAKU di Kelurahan Hamadi masih rendah. Secara keseluruhan, penelitian ini menggambarkan tantangan dalam implementasi program serta pentingnya memperkuat partisipasi masyarakat dan manajemen program yang efektif untuk meningkatkan keberhasilan Program Kota Tanpa Kumuh di berbagai lokasi.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa melengkapinya sarana dan prasarana yang belum ada di Bappeda Kota Bandar Lampung untuk memberikan kemudahan pelaksanaan tanggung jawab dan memberikan pembinaan dan pelatihan pegawai terkait kewajiban yang menyangkut implementasi program kota tanpa kumuh di Kota Bandar Lampung.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu waktu dan biaya yang cukup terbatas

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih terbatasnya temuan yang peneliti temukan, oleh karena itu agar dapat dilakukan penelitian lanjutan di lokasi serupa untuk menambah rekomendasi dan mengatasi permasalahan yang ada serta mencegah permasalahan baru

yang dikhawatirkan akan muncul.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Bapedda Provinsi Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A., & Suriyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DALAM MENGATASI PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BELIMBING RAYAKECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG. JAPB, 5(1), 1-14.
- Adisasmita, Rahardjo. 2010. Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ag Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005
- Agustina, D. (2021). Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Karyawan Bengkel Auto Dakar Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).
- Fitri, A. (2021). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
- Idelia, A. D., Yusuf, Y., & Kurniawan, I. A. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN CIBODAS KECAMATAN CIBODAS KOTA TANGERANG. JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI, 11(2), 87-94.
<https://doi.org/10.33592/jiia.v11i2.2134>
- Belasari, B., Rahman, B., & Ranto, R. (2022). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai Inovasi dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020. Jurnal Studi Inovasi, 2(2), 1-16.
- Budi Winarno, 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo
- Novira, A., & Suherman, N. P. (2023). Penerapan Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 7(1), 170-175.
- Ramandei, L., & Nawipa, S. (2023). Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) terhadap Pencegahan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 1800-1816.

- Rahmani, M. R., Arifin, J., & Rijali, S. (2020). Implimentasi program kotaku (kota tanpa kumuh) q dalam mengatasi pemukiman kumuh di kelurahan agung kecamatan tanjung kabupaten tabalong. *JAPB*, 3(1), 196-212.
- Thoyibatun, S. (2012). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi serta akibatnya terhadap kinerja organisasi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 16(2), 245-260.
- Wulandari, I. A., Syahrani, H., & Paselle, E. (2019). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. *EJournal Administrasi Negara*, 7(4), 9422-9436.
- Zulyanti, D. (2017). Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Sebagai Model Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Zulyanto, A. (2022). Determinan Pemekaran Wilayah Dan Fragmentasi Pemerintahan Di Indonesia. *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 69-82.

